

Analisis Komprehensif Operasi Trisula: Pembersihan PKI dan Pelajaran Historisnya

Oleh Pusat Studi Teknologi dan Kebijakan Publik (PSTKP) 2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
I. Pendahuluan.....	2
Peristiwa G30S/PKI dan Konsolidasi Kekuatan PKI di Blitar Selatan.....	2
Tujuan Resmi Operasi Trisula.....	3
II. Analisis Operasi Trisula.....	4
Definisi dan Karakteristik Operasi Militer.....	4
Aktor Kunci (TNI, Tokoh PKI, Masyarakat Sipil).....	4
Kronologi dan Durasi Operasi (Mei-September 1968).....	6
Lokasi Peristiwa.....	7
Motivasi dan Justifikasi Operasi.....	8
Strategi, Taktik, dan Kekuatan yang Dikerahkan.....	8
III. Dampak dan Konsekuensi Operasi Trisula.....	13
Penumpasan Kekuatan PKI dan Penangkapan Tokoh Kunci.....	13
Korban dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	13
Narasi Sejarah Resmi vs. Alternatif.....	15
IV. Pelajaran yang Dapat Dipetik.....	16
Karya yang dikutip.....	18

I. Pendahuluan

Peristiwa G30S/PKI dan Konsolidasi Kekuatan PKI di Blitar Selatan

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 di Jakarta menandai sebuah titik balik krusial dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini, yang diinterpretasikan sebagai upaya kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia, berhasil digagalkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto.¹ Pasca-penumpasan awal ini, kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh terlibat dalam G30S tidak sepenuhnya musnah. Sebaliknya, sisa-sisa anggota dan simpatisan PKI berupaya untuk bersembunyi dan mengkonsolidasi kembali kekuatan mereka, terutama di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Blitar Selatan, bersama dengan Malang Selatan dan Tulungagung, menjadi fokus utama operasi pembersihan ini karena diidentifikasi sebagai lokasi strategis bagi sisa-sisa PKI untuk bersembunyi dan membangun kembali jaringan mereka.² Pemilihan Blitar Selatan sebagai basis pemberontakan "gaya baru" PKI didasarkan pada karakteristik geografisnya yang tandus, berbukit, dan memiliki banyak gua, yang menawarkan tempat persembunyian yang ideal dan terisolasi.⁴ Secara historis, wilayah ini juga dikenal sebagai "sarang bromocorah" dan memiliki akar komunisme yang subur, sebuah kondisi yang diperparah oleh realitas sosial-ekonomi masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁶

Pilihan Blitar Selatan sebagai pusat konsolidasi PKI pasca-G30S bukan sekadar kebetulan geografis atau demografis. Hal ini mencerminkan pemahaman strategis oleh pimpinan PKI terhadap kondisi sosio-ekonomi dan geografis wilayah tersebut. Isolasi geografis memberikan perlindungan dari jangkauan langsung aparat keamanan, sementara kemiskinan dan sejarah panjang komunisme diyakini dapat memfasilitasi dukungan, atau setidaknya penerimaan, dari penduduk lokal. Ini menunjukkan bahwa upaya kebangkitan PKI tidak semata-mata didasarkan pada ideologi, tetapi juga memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pola ini seringkali diamati dalam konflik internal, dimana gerakan yang dianggap subversif cenderung menemukan dukungan atau tempat berlindung di daerah yang terpinggirkan secara ekonomi atau memiliki sejarah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyelesaian jangka panjang terhadap konflik semacam ini seringkali tidak cukup hanya

dengan tindakan militer, melainkan harus mencakup pembangunan sosio-ekonomi dan penyelesaian akar masalah ketidakadilan.

Tokoh-tokoh kunci PKI yang berhasil melarikan diri dari penumpasan di Jakarta dan daerah lain, seperti Rewang, Oloan Hutapea, Ruslan Widjajasastra, dan Munir (yang menjabat sebagai Ketua Departemen Bersenjata PKI Blitar Selatan), berkumpul di Blitar Selatan.¹ Mereka mengadakan rapat Politbiro Central Comite (CC) PKI pada April 1967 untuk membentuk kepengurusan baru dan menyusun strategi kebangkitan.⁶ Aktivitas mereka di wilayah tersebut digambarkan mencakup perampokan, sabotase, dan menciptakan keresahan di kalangan penduduk, yang menjadi justifikasi bagi tindakan militer pemerintah.⁴

Tujuan Resmi Operasi Trisula

Operasi Trisula secara resmi dilakukan oleh TNI pada tahun 1968 dengan tujuan utama untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S.² Target operasionalnya adalah "menggulung kekuatan PKI" di wilayah Blitar Selatan, Malang Selatan, dan Tulungagung.²

Namun, tujuan operasi ini melampaui sekadar penumpasan fisik. Bagi mereka yang ditangkap dan masih hidup, TNI memberikan "pembinaan" yang bertujuan untuk "menguatkan mental rakyat dari pengaruh PKI".² Hal ini menunjukkan bahwa Operasi Trisula memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar operasi militer. "Pembinaan" yang diberikan kepada para tahanan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan re-edukasi atau indoktrinasi ideologis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengaruh komunisme benar-benar terhapus dari pikiran masyarakat, sejalan dengan konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan ideologi anti-komunismenya. Ini mengungkapkan bagaimana rezim otoriter pasca-konflik seringkali tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tetapi juga kontrol ideologis dan naratif untuk mengamankan kekuasaan dan mencegah kebangkitan kembali oposisi. "Pembersihan" meluas dari fisik ke mental, menciptakan dampak jangka panjang pada memori kolektif dan kebebasan berpikir. Operasi ini dipandang sebagai langkah krusial untuk "mengakhiri gerakan subversif PKI secara total" dengan menghancurkan proyek pembangunan kembali kekuatan mereka.¹

II. Analisis Operasi Trisula

Definisi dan Karakteristik Operasi Militer

Operasi Trisula adalah sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1968.² Operasi ini secara spesifik merupakan operasi "pembersihan" yang menargetkan sisa-sisa kekuatan PKI pasca-peristiwa G30S.²

Menariknya, istilah "Operasi Trisula" tidak hanya merujuk pada peristiwa militer historis, tetapi juga pada sebuah film dokumenter tahun 1987 yang berjudul lengkap "Penumpasan Sisa-Sisa PKI di Blitar Selatan: Operasi Trisula." Film ini disutradarai oleh BZ Kadaryono dan diproduksi oleh Perusahaan Produksi Film Negara (PFN), yang merupakan sekuel dari film "Pengkhianatan G 30 S PKI." Film ini secara eksplisit berfungsi sebagai bentuk propaganda yang mengisahkan operasi penumpasan anggota G30S/PKI yang melarikan diri.⁴ Keberadaan film ini menunjukkan bahwa "Operasi Trisula" memiliki sifat ganda: sebagai aksi militer nyata dan sebagai alat propaganda negara. Film yang dibuat hampir dua dekade setelah operasi sebenarnya, berfungsi untuk melegitimasi tindakan negara di masa lalu dan menanamkan ideologi anti-komunis dalam memori kolektif masyarakat. Ini adalah contoh bagaimana "pembersihan" meluas dari tindakan fisik ke ranah informasi dan persepsi publik. Penting untuk dicatat bahwa keakuratan sejarah film ini menjadi kontroversi di kalangan sejarawan dan akademisi, menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara narasi resmi dan analisis kritis.¹⁰ Hal ini menyoroti pentingnya media dan produksi budaya yang dikendalikan negara dalam membentuk memori sejarah dan membenarkan tindakan masa lalu, terutama dalam konteks rezim otoriter pasca-konflik. Ini juga menunjukkan tantangan dalam membedakan kebenaran sejarah ketika narasi resmi sangat dipengaruhi oleh agenda politik.

Aktor Kunci (TNI, Tokoh PKI, Masyarakat Sipil)

Pelaku Operasi:

Aktor utama dalam Operasi Trisula adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima Kodam VIII/Brawijaya, Mayjen TNI M. Yasin, merupakan inisiator yang melantik Komando Satuan Tugas (Satgas) Trisula pada 18 Mei 1968.² Komandan Satgas Trisula dipimpin oleh Kolonel Witarmin 2, yang didampingi oleh Wakil Komandan Letkol Inf B. Sasmito dan Kepala Staf Letkol Inf Soegondho.⁹

Kekuatan pasukan yang dikerahkan dalam operasi ini sangat signifikan, melibatkan 5.000 pasukan darat.⁹ Pasukan ini terdiri dari berbagai batalyon di bawah Kodam VIII/Brawijaya, termasuk Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha Blitar yang memainkan peran krusial¹, serta elemen dari Kostrad dan unit Intel Corps.⁹ Beberapa batalyon yang disebut secara spesifik adalah Batalyon Infanteri 531/Para, 511, 513, 521, dan 527.⁹

Selain itu, Operasi Trisula juga menerima dukungan signifikan dari elemen sipil, khususnya Ansor Banser NU, dengan lebih dari 10.000 anggota Banser dari berbagai wilayah seperti Blitar, Kediri, Malang, Jombang, Tulungagung, dan Trenggalek yang diterjunkan ke Blitar Selatan.⁸ Anggota Banser yang mengenakan pakaian Hansip, bersama personel TNI dan masyarakat, membentuk barisan panjang hingga puluhan kilometer untuk pengepungan.⁸ Keterlibatan milisi sipil yang masif ini dalam operasi militer menunjukkan adanya mobilisasi kekuatan yang luas.¹⁴

Target Operasi (Sisa-sisa PKI):

Target utama operasi ini adalah sisa-sisa kekuatan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh terlibat peristiwa G30S.2 Figur-figur kunci PKI yang melarikan diri dari Jakarta dan daerah lain dan berupaya membangun kembali partai di Blitar Selatan, seperti Rewang, Oloan Hutapea, Ruslan Widjajasastra, dan Munir (Ketua Departemen Bersenjata PKI Blitar Selatan), serta Kartomo, B.O. Hutapea, dan Sukatno Hoeseni, menjadi sasaran utama.¹ Mereka digambarkan melakukan perampokan, sabotase, dan meresahkan penduduk, yang menjadi alasan resmi penumpasan.⁴

Masyarakat Sipil:

Meskipun target resmi adalah sisa-sisa PKI, masyarakat desa di Blitar Selatan juga terlibat secara langsung dalam dampak operasi. Mereka dituduh menyembunyikan dan membantu buronan komunis.¹⁵ Beberapa warga memang secara aktif membantu sebagai kurir atau tempat persembunyian, menyadari status buronan mereka.¹⁵ Namun, selama Operasi Trisula, sebagian besar korban yang berjatuh ternyata bukan berasal dari anggota PKI, melainkan dari masyarakat biasa. Hal ini terjadi karena TNI menganggap semua orang yang tinggal di wilayah Blitar Selatan adalah simpatisan dan anggota PKI.¹⁶

Perluasan definisi "musuh" dari anggota PKI aktif menjadi seluruh populasi sipil di wilayah operasi sangatlah signifikan. Keterlibatan milisi sipil (Banser/Hansip) bersama militer semakin mengaburkan batas antara aktor negara dan

masyarakat sipil dalam pelaksanaan kekerasan. Kategorisasi luas ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap non-kombatan, menunjukkan pendekatan yang tidak diskriminatif dalam "pembersihan." Pola ini sering terlihat dalam operasi kontra-pemberontakan di mana populasi sipil di wilayah yang disengketakan secara kolektif dicurigai atau distigmatisasi. Hal ini mengarah pada kekerasan tanpa pandang bulu dan pelanggaran HAM, menyoroti bahaya pelabelan ideologis dan konsekuensinya terhadap penduduk sipil selama konflik internal.

Penduduk desa dievakuasi, dikenai penyaringan dan interogasi, dan tidak diizinkan kembali atau direlokasi ke tempat lain.¹⁵ Kaum pria diinstruksikan untuk berpatroli bersama tentara untuk menangkap buronan dan mencabut tanaman pangan untuk membuat mereka kelaparan.¹⁵ Wanita juga dianggap simpatisan, dan beberapa dipaksa menjadi pembantu rumah tangga militer serta teman seksual tentara.¹⁵

Kronologi dan Durasi Operasi (Mei-September 1968)

Operasi Trisula memiliki kronologi yang jelas, dimulai dengan persiapan dan diakhiri dengan upacara penutupan. Komando Satuan Tugas (Satgas) Trisula dilantik pada 18 Mei 1968 oleh Panglima Kodam VIII/Brawijaya Mayjen TNI M. Yasin.² Operasi ini secara resmi dimulai pada 1 Juni 1968⁹, dengan penutupan seluruh area operasional mulai 5 Juni 1968.⁹

Selama operasi, beberapa tokoh kunci PKI berhasil ditangkap atau tewas. Ir. Soerachman tewas tertembak pada 15 Juni 1968.⁷ Rewang berhasil ditangkap pada pertengahan Juli 1968 di Sumberjati¹, dan Ruslan Widjajasastra juga ditangkap pada pertengahan Juli 1968 di Kaligrenjeng.² Munir, Ketua Departemen Bersenjata PKI Blitar Selatan, ditangkap pada bulan yang sama di Jembangan.¹ Oloan Hutapea tewas pada 21 Juli 1968.⁶ Upacara penutupan Operasi Trisula berlangsung pada 7 September 1968 di Blitar, disaksikan oleh Mayjen M. Yasin dan Panglima Kostrad Mayjen Kemal Idris.²

Terdapat disparitas data mengenai durasi operasi. Sumber Kompas.com menyatakan bahwa operasi ini berlangsung "satu setengah bulan".² Namun, sumber Wikipedia⁹ dan jurnal akademis¹⁵ menyebutkan durasi "3 bulan, 1 minggu" atau "just over three months" (dari akhir Mei hingga awal September 1968). Perbedaan durasi ini, meskipun tampak kecil, sangat signifikan dalam membentuk narasi sejarah. Durasi yang lebih pendek (1,5 bulan) dapat menyiratkan kemenangan militer yang lebih cepat dan efisien, sejalan dengan

narasi tindakan negara yang tegas dan efektif. Sebaliknya, durasi yang lebih panjang (3+ bulan) dapat menunjukkan operasi yang lebih berlarut-larut dan menantang, yang berpotensi melibatkan lebih banyak korban atau penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk. Sumber-sumber berita, meskipun kredibel, mungkin mencerminkan garis waktu yang lebih disederhanakan atau disetujui secara resmi. Disparitas ini menyoroti cara-cara halus di mana narasi sejarah dapat dibentuk, bahkan melalui detail faktual seperti durasi, dan menekankan pentingnya membandingkan berbagai sumber, terutama dalam peristiwa sejarah yang sensitif secara politik, untuk mengungkap potensi bias atau penyederhanaan dalam catatan resmi atau semi-resmi.

Lokasi Peristiwa

Lokasi utama Operasi Trisula adalah Blitar Selatan, Jawa Timur, Indonesia.² Operasi ini juga menargetkan sisa-sisa PKI di Malang Selatan dan Tulungagung.²

Karakteristik geografis Blitar Selatan sangat penting dalam konteks ini. Wilayah ini digambarkan sebagai daerah tandus, berbukit, dan memiliki banyak gua, yang dimanfaatkan oleh sisa-sisa PKI sebagai tempat persembunyian dan penyusunan strategi.⁴ Mayjen Soebijakto menyebut Blitar Selatan sebagai tempat terisolasi, menjadikannya pilihan strategis bagi PKI untuk membangun kembali kekuatan mereka.⁶

Pelaksanaan Operasi Trisula diawali dengan penutupan seluruh area operasional mulai 5 Juni 1968. Batas-batas penutupan meliputi: Barat (Campur Darat, Tulungagung Selatan), Utara (sepanjang jalan raya Tulungagung di sepanjang Sungai Brantas hingga Kalipare, Blitar Selatan), dan Timur (Kalipare lurus ke selatan melalui Sumbermanjing Kulon hingga pantai Samudra Hindia).⁹

Blitar Selatan bukan sekadar lokasi geografis; ia adalah simbol dari upaya PKI untuk bangkit kembali dan tekad Orde Baru untuk membasmi sisa-sisa pengaruh komunis. Fitur geografisnya memfasilitasi aktivitas klandestin PKI, sementara kondisi sosio-ekonomi kemungkinan menyediakan lahan subur bagi ideologi mereka. Ketelitian pengepungan militer⁹ dan pembangunan Monumen Trisula di Bakung Utara, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, menggarisbawahi signifikansi lokasi ini sebagai situs "kemenangan" atas komunisme dan penanda penting operasi.¹¹ Hal ini mengilustrasikan bagaimana area geografis tertentu dapat menjadi pusat konflik nasional yang lebih luas, berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi perlawanan dan titik fokus bagi proyeksi kekuatan negara. Pilihan lokasi dan memorialisasi selanjutnya mencerminkan perjuangan ideologis

yang lebih dalam dan konstruksi memori nasional.

Motivasi dan Justifikasi Operasi

Motivasi utama di balik Operasi Trisula adalah untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan anggota PKI yang dituduh terlibat G30S, yang dianggap masih berpotensi mengancam stabilitas negara.² Operasi ini dilancarkan karena intelijen mengendus adanya upaya PKI untuk menggalang kekuatan dan bangkit kembali di Blitar Selatan setelah peristiwa G30S.² Aktivitas PKI di Blitar Selatan, seperti perampokan dan sabotase, juga menjadi justifikasi untuk tindakan militer karena dianggap meresahkan penduduk.⁴

Selain itu, bagian dari justifikasi operasi juga mencakup upaya "pembinaan" bagi mereka yang ditangkap untuk "menguatkan mental rakyat dari pengaruh PKI," menunjukkan tujuan ideologis di balik operasi ini.² Motivasi Operasi Trisula bukan semata-mata militer. Ini sangat terkait dengan ideologi anti-komunis Orde Baru. Narasi tentang sisa-sisa PKI yang menyebabkan keresahan memberikan ancaman yang nyata, sementara "pembinaan" dan propaganda berfungsi untuk melegitimasi tindakan keras secara ideologis dan mengukuhkan dukungan publik terhadap sikap anti-komunis. Justifikasi resmi bertujuan membingkai operasi sebagai pertahanan yang diperlukan bagi negara dan Pancasila. Hal ini mengilustrasikan bagaimana tindakan negara, terutama yang melibatkan penggunaan kekuatan signifikan dan memiliki implikasi hak asasi manusia, seringkali dibenarkan dengan membingkai suatu kelompok sebagai ancaman eksistensial dan dengan membangun narasi ideologis yang kuat. "Mengapa" ini melampaui masalah keamanan langsung dan merujuk pada kontrol politik jangka panjang dan penindasan perbedaan pendapat.

Film dokumenter "Operasi Trisula" sendiri dibuat sebagai sekuel film "Pengkhianatan G 30 S PKI" dan berfungsi sebagai propaganda.⁴ Ini menunjukkan bahwa justifikasi operasi tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dibangun melalui narasi resmi yang kuat untuk melegitimasi tindakan pemerintah dan militer di mata publik.

Strategi, Taktik, dan Kekuatan yang Dikerahkan

Operasi Trisula dimulai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Trisula yang dilantik pada 18 Mei 1968 oleh Mayjen TNI M. Yasin, dan dipimpin oleh Kolonel Witarmin.² Kekuatan militer yang dikerahkan sangat besar, melibatkan sekitar 5.000 pasukan darat.⁹ Pasukan ini terdiri dari batalyon-batalyon organik Kodam VIII/Brawijaya, termasuk Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha yang berperan

penting dalam penangkapan tokoh PKI dan penemuan fasilitas tersembunyi seperti "Ruba" (ruangan bawah tanah ala Vietnam) ¹, serta elemen-elemen dari Kostrad dan unit Intel Corps.⁹

Dukungan udara juga merupakan komponen penting dari operasi ini. Kekuatan udara taktis mencakup berbagai jenis pesawat dan helikopter, seperti A-26, P-51, C-130, T-6, dan Mil Mi-4.⁹ Satu Kompi Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) juga terlibat dalam elemen dukungan udara taktis.⁹

Berikut adalah tabel yang merinci struktur komando dan kekuatan militer yang dikerahkan dalam Operasi Trisula:

Tabel 1: Struktur Komando dan Kekuatan Militer Operasi Trisula

Kategori	Detail
Pimpinan Operasi	Panglima Kodam VIII/Brawijaya: Mayjen TNI M. Yasin
	Komandan Satgas Trisula: Kolonel Inf Witarmin
	Wakil Komandan: Letkol Inf B. Sasmito
	Kepala Staf: Letkol Inf Soegondho
Kekuatan Darat	Total Pasukan: 5.000 troops
	Batalyon Pelaksana: Infanteri 531/Para, 511, 513, 521, 527
	Komando Kewilayahan: Kodim 0807/Tulungagung, 0808/Blitar, 0818/Malang, Koramil 0818/10 Pagak, 0818/11 Donomulyo, 0818/13 Kalipare, 0809/9 Sutojayan, 0808/10 Kademangan, 0808/11 Binangun, 0807/6 Rejotangan, 0807/8 Kalidawir
Elemen Pendukung	Kostrad, unit Intel Corps, Kompi Polisi Militer, Peleton Zeni Tempur, Tim Transportasi, Tim Perlengkapan, Tim Informasi, Tim Pembinaan Rohani, Tim Perbekalan, Tim BRDM dan Zeni Amfibi
Dukungan Sipil/Paramiliter	Ansor Banser NU (lebih dari 10.000 anggota), Hansip, Masyarakat

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas dan terkonsolidasi tentang struktur organisasi dan skala operasi, mengumpulkan informasi yang tersebar dari berbagai sumber. Pencantuman jumlah pasukan dan berbagai batalyon, bersama dengan dukungan udara, secara langsung menyampaikan sumber daya militer yang signifikan yang dikerahkan. Selain itu, secara eksplisit memasukkan Banser/Hansip dan anggota masyarakat umum menggarisbawahi pendekatan "perang total" dan kaburnya batas antara peran militer dan sipil, yang merupakan aspek penting mengenai implikasi hak asasi manusia.

Berikut adalah tabel yang merinci dukungan udara yang dikerahkan dalam Operasi Trisula:

Tabel 2: Dukungan Udara Operasi Trisula

Jenis Pesawat	Jumlah (jika spesifik)	Unit Pendukung
A-26	2	Satu Skadron (Bagian dari Reinforcement of the Tactical Air Force)
P-51	3	Satu Skadron (Bagian dari Reinforcement of the Tactical Air Force)
C-130	1	
T-6	3	
Mil Mi-4 (Helikopter)	4	Satu Skadron (Bagian dari Reinforcement of the Tactical Air Force)
B-25	2	Satu Skadron (Bagian dari Reinforcement of the Tactical Air Force)
Mustang	3	Satu Skadron (Bagian dari Reinforcement of the Tactical Air Force)
Harvard	3	Satu Skadron (Bagian dari

		Reinforcement of the Tactical Air Force)
Kopasgat	Satu Kompi Komando Pasukan Gerak Cepat	Reinforcement of the Tactical Air Force

Tabel ini berharga untuk merinci kekuatan udara yang dikerahkan. Variasi dan jumlah pesawat menunjukkan tingkat perencanaan militer dan alokasi sumber daya yang signifikan, menunjukkan keseriusan ancaman yang dirasakan. Dukungan udara menyiratkan penggunaan pengawasan udara, pemboman, atau penembakan, yang secara langsung berkaitan dengan "penghancuran desa dan ladang" yang disebutkan dalam sumber¹⁵, memberikan hubungan konkret antara aset militer dan dampaknya yang menghancurkan.

Taktik "Ublek Telur":

Judul beberapa artikel secara spesifik menyebutkan penggunaan "Taktik Ublek Telur" oleh Kodam Brawijaya untuk memberangus PKI Blitar Selatan.⁶ Meskipun salah satu sumber menyatakan bahwa artikel tersebut tidak memberikan detail tentang implementasi taktik ini⁶, beberapa elemen operasional yang dijelaskan dalam sumber lain dapat diasosiasikan dengan konsep "ublek telur."

"Taktik Ublek Telur" kemungkinan melambangkan strategi saturasi dan kontrol total, yang bertujuan untuk membasmi dan menetralkan semua elemen komunis yang dicurigai dengan "mengaduk" seluruh area secara menyeluruh. Istilah "ublek telur" secara harfiah berarti "mengocok telur," menyiratkan pencampuran yang menyeluruh dan kacau, tidak meninggalkan apa pun yang tidak tersentuh. Ini menyiratkan kurangnya penargetan yang tepat dan kesediaan untuk memperlakukan seluruh populasi di zona operasi sebagai berpotensi bermusuhan atau terlibat. Kurangnya penjelasan rinci dalam sumber resmi untuk taktik yang diberi nama begitu jelas ini lebih lanjut menunjukkan sifatnya yang berpotensi brutal atau tidak konvensional, yang mungkin tidak didokumentasikan secara terbuka.

Beberapa elemen operasional yang mendukung interpretasi ini meliputi:

- Pengepungan (Encirclement): Pasukan gabungan Banser, Hansip, personel TNI, dan masyarakat membentuk barisan panjang hingga puluhan kilometer,

mengepung wilayah dari Suruhwadang hingga Maron.⁸

- Penggeropyokan Kilat (Swift Raids): Setelah pengepungan, dilakukan aksi penggeropyokan kilat.⁸
- Gerakan Intensif di Perbatasan: Pasukan bergerak intensif di seluruh perbatasan Blitar Selatan di wilayah Tulungagung dan Malang, yang diidentifikasi sebagai jalur keluar masuk kurir PKI dari Surabaya dan Malang.⁸
- Interogasi: Kader PKI tingkat bawah seringkali memilih "mengunci mulut" (Gerakan Tutup Mulut/GTM), sementara kader tingkat menengah ke atas cenderung berbicara, dan informasi mereka digunakan sebagai petunjuk operasi oleh TNI.⁸
- Penghancuran Sumber Daya: Tentara memerintahkan kaum pria untuk berpatroli bersama tentara dan mencabut tanaman pangan untuk membuat buronan kelaparan.¹⁵
- Penggunaan Kekuatan Militer Berat: Penggunaan api dan artileri berat oleh tentara menghancurkan desa dan ladang, serta menyebabkan trauma pada penduduk.¹⁵

Taktik ini, dikombinasikan dengan definisi "musuh" yang luas, menunjukkan sifat sistematis dari "pembersihan" dan pengabaianya terhadap kehidupan dan hak-hak warga sipil. Hal ini menggarisbawahi bagaimana operasi militer, terutama yang memiliki landasan ideologis, dapat berujung pada hukuman kolektif dan pelanggaran hak asasi manusia ketika proses hukum dan perlindungan sipil diabaikan.

Hasil Operasional:

Operasi Trisula berhasil menggulung kekuatan PKI di Blitar Selatan dalam waktu yang relatif singkat.² Sebanyak 57 pemimpin dan aktivis dari PKI dan organisasi massanya berhasil ditangkap, dan beberapa pemimpin tewas selama operasi.

III. Dampak dan Konsekuensi Operasi Trisula

Penumpasan Kekuatan PKI dan Penangkapan Tokoh Kunci

Operasi Trisula secara umum dianggap berhasil menggulung kekuatan PKI di Blitar Selatan.² Keberhasilan ini diklaim mampu mengakhiri gerakan subversif PKI secara total, menghancurkan proyek pembangunan kembali kekuatan mereka.¹ Beberapa tokoh kunci PKI tewas dalam operasi ini, antara lain Ir. Soerachman yang tewas tertembak pada 15 Juni 1968, dan Oloan Hutapea yang tewas pada 21 Juli 1968. Film "Operasi Trisula" bahkan menggambarkan kematian Oloan akibat dilempari batu.⁷

Selain itu, sejumlah tokoh PKI berhasil ditangkap, seperti Rewang dan Ruslan Widjajasastra pada pertengahan Juli 1968, serta Munir (Ketua Departemen Bersenjata PKI Blitar Selatan) pada bulan yang sama.¹ Munir, Ruslan, dan tokoh lainnya yang ditangkap kemudian menjalani proses persidangan subversif di Jakarta.⁷ Secara keseluruhan, militer melaporkan bahwa 57 pemimpin dan aktivis dari PKI dan organisasi massanya berhasil ditangkap sebagai hasil operasi ini.¹⁵

Meskipun Operasi Trisula berhasil secara militer dalam menumpas upaya PKI untuk bangkit kembali, operasi ini pada dasarnya mengatasi gejala (kebangkitan PKI) daripada akar masalah sosio-ekonomi dan politik yang memungkinkannya berkembang (misalnya, kemiskinan, isolasi, sejarah kehadiran komunis). "Keberhasilan" didefinisikan oleh kemenangan militer dan eliminasi ancaman yang dirasakan, tetapi tidak serta merta menyelesaikan masalah masyarakat yang lebih dalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas jangka panjang dari solusi yang murni militer terhadap masalah politik dan ideologis yang kompleks. Ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman langsung dapat dinetralkan, keluhan masyarakat yang lebih dalam dapat tetap ada, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan di masa depan atau memerlukan kontrol negara yang berkelanjutan, seringkali represif.

Korban dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dampak Operasi Trisula terhadap hak asasi manusia dan masyarakat sipil di Blitar Selatan merupakan salah satu aspek yang paling kontroversial dan tragis.

Terdapat perbedaan signifikan dalam data korban. Sumber Wikipedia menyebutkan 18 tentara tewas, 2 polisi terluka, 66 PKI tewas, dan 850 ditangkap.⁹ Namun, jurnal akademis oleh Vanessa Hearman menyatakan bahwa Operasi Trisula, yang berlangsung sedikit lebih dari tiga bulan, mengakibatkan 2.000 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan dan dipindahkan.¹⁵ Sumber lain juga menyebutkan 3 personel militer tewas dalam penyergapan oleh PKI.¹⁸ Perbedaan angka ini menunjukkan kontestasi narasi yang kuat mengenai skala dan sifat kekerasan.

Berdasarkan keterangan korban dan bukti-bukti keberadaan kuburan massal, selama dan beberapa tahun setelah Operasi Trisula, terjadi pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia yang luar biasa.¹⁶ Ini meliputi pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penculikan, pengusiran paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan, perampasan hak milik, kerja paksa, dan penghilangan hak politik (tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pemilu).¹⁶

Yang paling krusial, sebagian besar korban yang berjatuh ternyata bukan berasal dari anggota PKI, melainkan dari masyarakat biasa.¹⁶ Hal ini terjadi karena TNI menganggap semua orang yang tinggal di wilayah Blitar Selatan adalah simpatisan dan anggota PKI.¹⁶ Penduduk desa dievakuasi, dikenai penyaringan dan interogasi, dan tidak diizinkan kembali atau direlokasi ke tempat lain.¹⁵ Kaum pria diinstruksikan untuk berpatroli bersama tentara untuk menangkap buronan dan mencabut tanaman pangan untuk membuat mereka kelaparan.¹⁵ Wanita juga dianggap simpatisan, dan beberapa dipaksa menjadi pembantu rumah tangga militer serta teman seksual tentara.¹⁵ Penggunaan api dan artileri berat oleh tentara menghancurkan desa dan ladang, serta menyebabkan trauma pada penduduk.¹⁵

Skala kekerasan dan pengabaian hak sipil ini sangat mencolok. Perbedaan besar dalam angka korban dan rincian pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan biaya kemanusiaan yang parah, terutama bagi warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Kategorisasi luas oleh militer terhadap seluruh populasi sebagai "simpatisan" memfasilitasi pelanggaran ini, menyoroti pola hukuman kolektif dan penolakan sistematis terhadap hak-hak fundamental.

Dampak jangka panjang Operasi Trisula pada masyarakat Blitar Selatan dan memori kolektif sangat mendalam. Operasi ini menciptakan trauma yang dalam, ketakutan, dan perpecahan sosial yang bertahan selama beberapa dekade.¹⁵ Masyarakat di Blitar Selatan, terutama mereka yang dituduh terkait PKI, hidup

dalam pengawasan ketat dan stigmatisasi. Bahkan warga yang lahir setelah peristiwa itu pun mengalami diskriminasi dan pengawasan berkelanjutan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa narasi negara, yang diperkuat oleh monumen dan pengawasan, menekan memori alternatif dan menghambat diskusi terbuka. Ini adalah contoh nyata dari kekuatan abadi narasi sejarah yang dikendalikan negara dan tantangan dalam mencapai rekonsiliasi sejati tanpa mengakui ketidakadilan masa lalu.

Narasi Sejarah Resmi vs. Alternatif

Narasi sejarah Operasi Trisula terbagi menjadi dua aliran utama: narasi resmi yang didukung negara dan narasi alternatif yang muncul dari studi akademis dan kesaksian korban. Narasi resmi, yang diabadikan melalui Monumen Trisula di Blitar, menggambarkan operasi ini sebagai simbol persatuan kekuatan TNI dan rakyat dalam menghadapi ancaman besar terhadap negara, yakni PKI.¹² Monumen ini, yang diresmikan pada tahun 1972, dirancang untuk menyiratkan bahwa penduduk desa berjuang bahu-membahu dengan militer melawan komunis.¹⁵ Film "Operasi Trisula: Penumpasan Sisa-Sisa PKI di Blitar Selatan" yang diproduksi oleh negara juga berfungsi sebagai bentuk propaganda, yang bertujuan untuk melegitimasi tindakan militer dan mengukuhkan narasi resmi tentang kemenangan atas komunisme.⁴ Film ini secara eksplisit disebut sebagai sekuel dari film "Pengkhianatan G 30 S PKI," menunjukkan upaya konsisten untuk membentuk memori kolektif.

Namun, narasi ini sangat ditentang oleh berbagai sumber alternatif, terutama dari kalangan akademisi dan organisasi hak asasi manusia. Studi dan investigasi, seperti yang dilakukan oleh KontraS dalam "MENYUSUN PUZZLE PELANGGARAN HAM 65: BLITAR DAN BUTON," serta karya-karya akademis oleh Vanessa Hearman, menyajikan gambaran yang sangat berbeda.¹⁶ Sumber-sumber ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang parah selama Operasi Trisula, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, dan pengusiran paksa.¹⁵ Mereka menegaskan bahwa sebagian besar korban bukanlah anggota PKI aktif, melainkan masyarakat biasa yang dicap sebagai simpatisan.¹⁶

Kontestasi narasi ini dan perjuangan memori sangat terlihat dalam perdebatan tentang Operasi Trisula. Keberadaan narasi yang bersaing mengungkapkan perjuangan untuk kebenaran sejarah. Narasi resmi, yang disebarluaskan melalui monumen dan film, bertujuan untuk melegitimasi tindakan negara dan menekan perbedaan pendapat. Perspektif akademis dan hak asasi manusia,

bagaimanapun, menantang hal ini, menekankan biaya kemanusiaan dan kebutuhan akan pemahaman yang lebih bernuansa. Hal ini menggarisbawahi bagaimana sejarah bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bidang yang diperdebatkan, terutama dalam masyarakat pasca-konflik. Studi-studi ini juga membahas bagaimana narasi era Suharto terus mempolitisasi catatan sejarah, membentuk kesan dan ingatan mantan tahanan politik, dan memperdalam perpecahan sosial.¹⁶ Upaya untuk rekonsiliasi, seperti yang dimulai pada era Gus Dur, mencoba menjembatani perpecahan ini dengan melihat peristiwa dari perspektif kemanusiaan, bukan ideologis.⁷

IV. Pelajaran yang Dapat Dipetik

Peristiwa Operasi Trisula di Blitar Selatan pada tahun 1968, dengan segala kompleksitas dan dampaknya, menawarkan beberapa pelajaran penting bagi pemahaman sejarah dan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan damai:

1. Pentingnya Verifikasi Sejarah dari Berbagai Sumber: Adanya disparitas yang signifikan antara narasi resmi dan alternatif, terutama terkait jumlah korban dan sifat operasi, menekankan perlunya analisis kritis terhadap setiap sumber sejarah. Informasi yang disajikan oleh pihak berwenang atau melalui media yang dikendalikan negara mungkin memiliki agenda politik tertentu, yang memerlukan perbandingan dengan studi akademis independen, kesaksian korban, dan arsip lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan berimbang. Ini mengajarkan bahwa kebenaran sejarah seringkali tidak tunggal, melainkan merupakan mozaik dari berbagai perspektif yang perlu diverifikasi secara cermat.
2. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Akuntabilitas: Operasi Trisula secara jelas menunjukkan skala kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi dalam konteks pembersihan ideologis. Pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil biasa meninggalkan luka mendalam yang bertahan lintas generasi. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa tanpa pengakuan yang jujur terhadap pelanggaran masa lalu dan upaya akuntabilitas, luka sosial akan sulit disembuhkan. Mengabaikan penderitaan korban hanya akan memperpanjang siklus trauma dan ketidakadilan.
3. Bahaya Polarisasi Ideologis dan Stigmatisasi: Pendekatan militer yang menganggap seluruh populasi di Blitar Selatan sebagai simpatisan PKI, meskipun sebagian besar adalah warga biasa, menunjukkan bahaya dari

pelabelan ideologis yang luas dan demonisasi suatu kelompok. Polarisasi semacam itu dapat membenarkan kekerasan tanpa pandang bulu dan mengikis perlindungan hak-hak sipil. Ini mengajarkan bahwa masyarakat harus waspada terhadap upaya-upaya untuk mengkotak-kotakkan dan menstigmatisasi kelompok tertentu, karena hal tersebut dapat menjadi prekursor bagi kekerasan massal.

4. Kompleksitas Rekonsiliasi dan Penyembuhan Luka Sejarah: Upaya rekonsiliasi pasca-Operasi Trisula, yang dimulai secara signifikan pada era Gus Dur, menunjukkan bahwa penyembuhan luka sejarah adalah proses yang panjang dan kompleks. Meskipun ada kemajuan dalam merangkul keluarga eks-PKI dan mengurangi diskriminasi, memori kolektif yang terpolitisasi dan trauma yang mendalam masih menjadi tantangan. Pelajaran di sini adalah bahwa rekonsiliasi sejati memerlukan kerendahan hati untuk melihat peristiwa dari perspektif kemanusiaan, bukan ideologis, serta komitmen untuk membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial tanpa melupakan sejarah kelam.
5. Peran Negara dalam Membentuk Memori Kolektif: Produksi film propaganda dan pembangunan monumen yang mengabadikan narasi resmi menunjukkan kekuatan negara dalam membentuk dan mengontrol memori kolektif. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana sejarah dapat digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi kekuasaan dan menekan perbedaan pendapat. Penting bagi masyarakat sipil dan akademisi untuk terus menantang narasi tunggal dan memperjuangkan ruang bagi memori-memori alternatif agar sejarah dapat dipelajari secara kritis dan komprehensif.
6. Pentingnya Pembangunan Inklusif: Pemilihan Blitar Selatan sebagai basis PKI, yang didasarkan pada kondisi geografis terisolasi dan kemiskinan, menunjukkan bahwa masalah sosio-ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi gerakan yang dianggap subversif. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa stabilitas jangka panjang tidak hanya dicapai melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pembangunan yang inklusif, yang mengatasi ketimpangan ekonomi, isolasi, dan ketidakadilan sosial. Mengabaikan akar masalah ini hanya akan menciptakan potensi ketidakpuasan dan konflik di masa depan.

Karya yang dikutip

1. PERANAN BATALYON INFANTERI 511/DIBYATARA YUDHA ..., diakses Juni 19, 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9243>
2. Operasi Trisula, Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan - Kompas.com, diakses Juni 19, 2025, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/05/080000479/operasi-trisula-penumpasan-sisa-sisa-pki-di-blitar-selatan?page=all>
3. Operasi Trisula, Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan - Kompas.com, diakses Juni 19, 2025, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/05/080000479/operasi-trisula-penumpasan-sisa-sisa-pki-di-blitar-selatan>
4. Film Operasi Trisula: Sinopsis, Pemeran, dan Latar Belakang - Kompas Entertainment, diakses Juni 19, 2025, <https://entertainment.kompas.com/read/2022/10/24/170200666/film-operasi-trisula-sinopsis-pemeran-dan-latar-belakang>
5. Operasi Trisula: Penumpasan Sisa-Sisa PKI di Blitar Selatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Juni 19, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trisula:_Penumpasan_Sisa-Sisa_PKI_di_Blitar_Selatan
6. Kisah PKI Blitar Selatan Diberangus Pakai Taktik Ublek Telur ..., diakses Juni 19, 2025, <https://nasional.okezone.com/read/2023/07/07/337/2842501/kisah-pki-blitar-selatan-diberangus-pakai-taktik-ublek-telur-kodam-brawijaya>
7. Sejarah PKI di Blitar Selatan: Pemberontakan, Penumpasan dan ..., diakses Juni 19, 2025, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6322333/sejarah-pki-di-blitar-selatan-pemberontakan-penumpasan-dan-rekonsiliasi>
8. Kisah PKI Blitar Selatan Diberangus Pakai Taktik Ublek Telur Kodam Brawijaya - PAGE ALL, diakses Juni 19, 2025, <https://nasional.okezone.com/read/2023/07/07/337/2842501/kisah-pki-blitar-selatan-diberangus-pakai-taktik-ublek-telur-kodam-brawijaya?page=all>
9. Operation Trisula - Wikipedia, diakses Juni 19, 2025,

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Trisula

10. Cerita dan Fakta Film Operasi Trisula, Film Penumpasan Sisa Gerakan G30S/PKI di Blitar Selatan - Jatimtimes, diakses Juni 19, 2025,
<https://jatimtimes.com/baca/297520/20231001/160700/cerita-dan-fakta-film-operasi-trisula-film-penumpasan-sisa-gerakan-g30s-pki-di-blitar-selatan>
11. Kisah Monumen Operasi Trisula Bakung Tahun 1968, Kuatnya ABRI, Tumpas Basis PKI di Blitar Selatan, diakses Juni 19, 2025,
<https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275168251/kisah-monumen-operasi-trisula-bakung-tahun-1968-kuatnya-abri-tumpas-basis-pki-di-blitar-selatan>
12. Mengingat Penumpasan PKI di Blitar Selatan Lewat Monumen Trisula - detikcom, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6322174/mengingat-penumpasan-pki-di-blitar-selatan-lewat-monumen-trisula>
13. Kisah Operasi Trisula, Kodam Brawijaya Tumpas PKI di Blitar - Bagian All - iNews, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.inews.id/news/nasional/kisah-operasi-trisula-kodam-brawijaya-tumpas-pki-di-blitar/all>
14. anco amok : telaah historis atas peran gp ansor dalam penumpasan pki di pamekasan 1965 - Digilib UIN SUKA, diakses Juni 19, 2025,
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66277/1/19101020026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
15. Contesting Victimhood in the Indonesian Anti-Communist Violence ..., diakses Juni 19, 2025,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2017.1393943>
16. Operasi Trisula: Pembantaian atas Anggota dan Simpatisan PKI di ..., diakses Juni 19, 2025,
<https://19651966perpustakaanonline.wordpress.com/2018/10/28/operasi-trisula-pembantaian-atas-anggota-dan-simpatisan-pki-di-blitar-selatan-genosida-1965-1966/>
17. Monumen Trisula di Blitar, Simbol Persatuan Kekuatan TNI dan Rakyat Melawan PKI, diakses Juni 19, 2025,
<https://jatimnow.com/baca-72104-monumen-trisula-di-blitar-simbol-persatu>

[an-kekuatan-tni-dan-rakyat-melawan-pki](#)

18. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, diakses Juni 19, 2025,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9243/9180>
19. Nilai Penting Edukasi Sejarah pada Gua Umbultuk sebagai Persembunyian
Sisa-Sisa G30S/PKI, diakses Juni 19, 2025,
<https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/download/2287/1522/8750>